KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 201A/KEP/BSN/5/2019
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 28A/KEP/BSN/2/2015 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi Badan Standardisasi Nasional berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, perlu dilakukan perubahan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 28A/KEP/BSN/2/2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Standardisasi Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Kerja Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1325);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 28A/KEP/BSN/2/2015 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 28A/KEP/BSN/2/2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 109/KEP/BSN/5/2018 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 28A/KEP/BSN/2/2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2019
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

NOMOR : 201A/KEP/BSN/5/2019

TENTANG:

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 28A/KEP/BSN/2/2015 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

1. Tugas : melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
2. Fungsi :
   a. penyusunan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
   b. pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
   c. pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
   d. pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN;
   e. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN;
   f. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSN; dan
   g. pengawasan intern atas pelaksanaan tugas BSN.

3. Indikator Kinerja Utama :

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Cara Perhitungan	PJ Data/Sumber Data
1	Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar domestik dan global	1	Persentase pertumbuhan ekspor Produk Nasional yang didukung SNI, Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Metrologi (Standar Nasional Satuan Ukuran)	Perhitungan: (Jumlah ekspor Produk Nasional di dukung SNI, Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Metrologi tahun n) - (Jumlah ekspor PN didukung SNI, Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Metrologi thn n-1) ---------- x 100% (Jumlah ekspor Produk Nasional di dukung SNI, Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Metrologi thn n) Definisi: Survei angka pertumbuhan ekspor terhadap sample klien LPK yang diakreditasi KAN yang terkait dengan sertifikasi 14001, 9001, 22000, SVLK, halal; laboratorium; Lembaga Inspeksi; Sertifikasi Produk; SNSU.	PJ data: Pusrisbang Sumber data: Deputi PS, Deputi SNSU, Deputi Akreditasi, Deputi PSPK
		2	Persentase pertumbuhan produk ber-SNI di pasar retail dalam negeri	Perhitungan: (Jumlah produk bertanda SNI di pasar retail dalam negeri tahun n) - (Jumlah Produk bertanda SNI di pasar retail dalam negeri tahun n-1) ---------- x 100% (Jumlah Produk bertanda SNI di pasar retail dalam negeri tahun n) Definisi: Survei ke retail besar yang memiliki banyak cabang seluruh Indonesia (Hypermart, Transmart, Alfamart, Indomart) dikawasan Jabodetabek. Survei dilakukan pada beberapa produk ber SNI wajib untuk produk (makanan, minuman, helm,	PJ data: Pusrisbang Sumber data: Deputi PS, Deputi SNSU, Deputi Akreditasi, Deputi PSPK

				elektronik dan mainan) dan ber SNI tidak wajib (mie instan, kertas, bihun, mie kering dan lampu)	
		3	Indeks kepuasan masyarakat terhadap efektivitas Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Perhitungan: Survei persepsi masyarakat terhadap Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) menggunakan skala 1 – 5 Definisi: Survei yang dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap efektifitas Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Responden survei adalah stekholder SPK (Komite Teknis, Laboratorium Uji dan Laboratorium Kalibrasi, LSPro dan Industri penerap SNI, UKM Binaan BSN dan Lembaga Inspeksi, yang dilakukan dengan metode survei langsung dan tidak langsung dengan menggunakan kuisioner dengan minimal responden 100.	PJ data: Pusrisbang Sumber data: Deputi PS, Deputi SNSU, Deputi Akreditasi, Deputi PSPK
2	Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengembangan Standar	4	Jumlah Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan (masih aktif)	Perhitungan: (Jumlah SNI yang ditetapkan tahun n) + (Jumlah SNI aktif s.d tahun n-1) - (SNI abolisi tahun n) Definisi: Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia yang dirumuskan oleh Komite Teknis Perumusan SNI dan ditetapkan oleh BSN.	PJ Data: Deputi PS Sumber data: Deputi PS (Dit. AK2H, Dit. MEETTI, Dit. IPPE)
		5	Persentase SNI yang harmonis dengan standar internasional	Perhitungan: Jumlah SNI yang selaras dengan standar internasional (tahun n) ---------- x 100% Jumlah SNI yang telah ditetapkan (tahun n)	PJ Data: Deputi PS Sumber data: Deputi PS (Dit. AK2H, Dit. MEETTI, Dit. IPPE)

				Definisi: SNI yang harmonis dengan standar internasional adalah SNI yang dikembangkan sendiri atau SNI hasil adopsi (identik atau modifikasi) yang selaras dengan standar internasional	
3	Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran	6	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang tertelusur ke Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU)	Perhitungan: Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang tertelusur ke SI melalui Standar Nasional Satuan Ukuran (thn n) Definisi: Sertifikat kalibrasi yang tertelusur adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Lab kalibrasi terakreditasi KAN yang tertelusur ke SI melalui SNSU	PJ Data: Deputi SNSU Sumber Data: Deputi SNSU (Dit. MRB, Dit. TK)
		7	Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang diakui internasional	Perhitungan: Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang dihasilkan dan diakui secara internasional yang dapat dilihat pada website BIPM (kumulatif) Definisi: Kemampuan kalibrasi dan pengukuran yang tersedia untuk pelanggan sebagaimana dipublikasikan dalam basis DataKCDB dari CIPM MRA	PJ data: Deputi SNSU Sumber Data: Deputi SNSU (Dit. MRB, Dit. TK)
4	Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Akreditasi	8	Jumlah Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang diakreditasi	Perhitungan: Jumlah LPK (Lembaga Penilaian Kesesuaian) yang di akreditasi oleh KAN (kumulatif) Definisi: Penilaian Kesesuaian mencakup kelembagaan dan proses penilaian untuk menyatakan kesesuaian suatu kegiatan atau suatu produk terhadap SNI tertentu. Sesuai PP 102/2000, Komite Akreditasi Nasional (KAN) diberikan tugas untuk memberikan	PJ data: Deputi Akreditasi Sumber Data: Deputi Akreditasi (Dit. AL, Dit. ALIS)

				akreditasi kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian (Laboratorium Penguji, Laboratorium Kalibrasi, Laboratorium Medik, Lembaga Inspeksi, dan Lembaga Sertifikasi)	
		9	Jumlah pengakuan akreditasi secara internasional	Perhitungan: Jumlah pengakuan akreditasi (Laboratorium dan Lembaga Inspeksi) secara internasional (kumulatif) Definisi: Pengakuan akreditasi secara internasional merupakan pengakuan yang diberikan oleh organisasi internasional/regional (Mutual Recognition Arrangement/MRA APAC-ILAC, PAC MLA) kepada badan akreditasi dalam menjalankan kegiatan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian	PJ Data: Deputi Akreditasi Sumber Data: Deputi Akreditasi (Dit. AL, Dit. ALIS, Dit. SISHAR)
5	Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	10	Persentase SNI yang diterapkan	Perhitungan: Jumlah SNI yang diterapkan ---------- x 100% Jumlah total SNI yang aktif Definisi: SNI yang diterapkan adalah SNI yang diterapkan organisasi dibuktikan dengan sertifikat	PJ Data: Deputi PSPK Sumber Data: Deputi PSPK (Dit. PPSPK)
		11	Persentase produk bertanda SNI yang sesuai dengan persyaratan SNI	Perhitungan: Jumlah produk bertanda SNI yang sesuai dengan persyaratan SNI ---------- x 100% Jumlah total produk bertanda SNI Definisi: Efektifitas penerapan SNI dan Pemenuhan produk bertanda SNI yang sesuai dengan persyaratan SNI dilakukan melalui uji petik Pelaksanaan uji petik	PJ Data: Deputi PSPK Sumber Data: Deputi PSPK (Dit. SPSPK)

6	Meningkatkan kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi yang profesional	12	Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi BSN	Perhitungan: Hasil Penilaian lembar kerja evaluasi Reformasi Birokrasi dari KemenPANRB Definisi: Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pengukuran penilaian Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh KemenPANRB menggunakan penilaian Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil.	PJ Data: Settama Sumber Data: Biro SDMOH
		13	Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN	Perhitungan: Hasil Penilaian lembar kerja evaluasi AKIP dari KemenPANRB Definisi: Evaluasi AKIP dilakukan dan dinilai oleh KemenPANRB dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas atas outcome terhadap penggunaan anggaran. Penilaian dilakukan terhadap 5 komponen: Perencanaan Kinerja (35%), Pengukuran Kinerja (20%), Pelaporan Kinerja (15%), Evaluasi internal (10%), dan Capaian Kinerja (20%).	PJ Data: Settama Sumber Data: Biro PKU
		14	Opini atas Laporan Keuangan BSN	Perhitungan: Opini atas Laporan Keuangan tahun n-1 yang dikeluarkan oleh BPK Definisi: Opini atas Laporan Keuangan n-1 yang dikeluarkan oleh BPK setetelah dilakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan sekali dalam setahun.	PJ data: Settama Sumber Data: Biro PKU, Inspektorat

		15.	Persentase Penerapan Budaya Kerja BSN	Perhitungan: Jumlah nilai penerapan budaya kerja unit ---------- x 100% Jumlah unit kerja yang dinilai Definisi: Penilaian penerapan budaya kerja unit kerja di lingkungan BSN dengan kriteria/metode kontes antar unit kerja	PJ data: Settama Sumber Data: Biro SDMOH

I. DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STANDAR

1. Tugas : melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan standar.
2. Fungsi :
   a. penyusunan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor agro, kesehatan, energi, kimia, infrastruktur, transportasi, elektroteknika, telekomunikasi, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, dan aneka;
   b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor agro, kesehatan, energi, kimia, infrastruktur, transportasi, elektroteknika, telekomunikasi, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, dan aneka;
   c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor agro, kesehatan, energi, kimia, infrastruktur, transportasi, elektroteknika, telekomunikasi, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, dan aneka;
   d. pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar; dan
   e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala.
3. Indikator Kinerja Utama :

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Cara Perhitungan	PJ Data/Sumber Data
1	Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar domestik dan global	1	Persentase pertumbuhan ekspor Produk Nasional yang didukung SNI, Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Metrologi (Standar Nasional Satuan Ukuran)	Perhitungan: (Jumlah ekspor Produk Nasional di dukung SNI, Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Metrologi tahun n) - (Jumlah ekspor PN didukung SNI, Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Metrologi thn n-1) ---------- x 100%	PJ data: Pusrisbang Sumber data: Seluruh Unit Kerja

				(Jumlah ekspor Produk Nasional di dukung SNI, Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Metrologi thn n) Definisi: Survei angka pertumbuhan ekspor terhadap sample klien LPK yang diakreditasi KAN yang terkait dengan sertifikasi 14001, 9001, 22000, SVLK, halal; laboratorium; Lembaga Inspeksi; Sertifikasi Produk; SNSU	
		2	Persentase pertumbuhan produk ber-SNI di pasar retail dalam negeri	Perhitungan: (Jumlah produk bertanda SNI di pasar retail dalam negeri tahun n) - (Jumlah Produk bertanda SNI di pasar retail dalam negeri tahun n-1) ---------- x 100% (Jumlah Produk bertanda SNI di pasar retail dalam negeri tahun n) Definisi: Survei ke retail besar yang memiliki banyak cabang seluruh Indonesia (Hypermart, Transmart, Alfamart, Indomart) dikawasan Jabodetabek. Survei dilakukan pada beberapa produk ber SNI wajib untuk produk (makanan, minuman, helm, elektronik dan mainan) dan ber SNI tidak wajib (mie instan, kertas, bihun, mie kering dan lampu)	PJ data: Pusrisbang Sumber data: Seluruh Unit Kerja
		3	Indeks kepuasan masyarakat terhadap efektivitas Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Perhitungan: Survei persepsi masyarakat terhadap Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) menggunakan skala 1 – 5 Definisi: Survei yang dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap efektifitas Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.	PJ data: Pusrisbang Sumber data: Seluruh Unit Kerja

				Responden survei adalah stekholder SPK (Komite Teknis, Laboratorium Uji dan Laboratorium Kalibrasi, LSPro dan Industri penerap SNI, UKM Binaan BSN dan Lembaga Inspeksi, yang dilakukan dengan metode survei langsung dan tidak langsung dengan menggunakan kuisioner dengan minimal responden 100.	
2	Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengembangan Standar	4	Jumlah Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan	Perhitungan: Jumlah SNI yang ditetapkan tahun n Definisi: Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia yang dirumuskan oleh Komite Teknis Perumusan SNI dan ditetapkan oleh BSN.	PJ Data: Dit. AK2H, Dit. MEETTI, Dit. IPPE Sumber Data: Dit. AK2H, Dit. MEETTI, Dit. IPPE
		5	Persentase SNI yang harmonis dengan standar internasional	Perhitungan: Jumlah SNI yang selaras dengan standar internasional (tahun n) ---------- x 100% Jumlah SNI yang telah ditetapkan (tahun n) Definisi: SNI yang harmonis dengan standar internasional adalah SNI yang dikembangkan sendiri atau SNI hasil adopsi (identik atau modifikasi) yang selaras dengan standar internasional	PJ data: Dit. AK2H, Dit. MEETTI, Dit. IPPE Sumber Data: Dit. AK2H, Dit. MEETTI, Dit. IPPE
		6	Jumlah usulan rancangan Standar Internasional yang diajukan oleh Indonesia	Perhitungan: Jumlah usulan rancangan standar Internasional yang diajukan Indonesia pada tahun n (kumulatif) Definisi: Usulan Rancangan Standar Internasional adalah usulan Standar yang diajukan menjadi Rancangan Standar Internasional	PJ data: Dit. AK2H, Dit. MEETTI, Dit. IPPE Sumber Data: Dit. AK2H, Dit. MEETTI, Dit. IPPE

I.1 DIREKTORAT PENGEMBANGAN STANDAR AGRO, KIMIA, KESEHATAN, DAN HALAL

1. Tugas : melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional, serta pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar sektor agro, kimia, kesehatan, dan halal.

2. Fungsi :
   a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, perikanan dan kelautan, kimia, kesehatan, serta halal;
   b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, perikanan dan kelautan, kimia, kesehatan, dan halal;
   c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, perikanan dan kelautan, kimia, kesehatan, dan halal; dan
   d. penyiapan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar sektor pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, perikanan dan kelautan, kimia, kesehatan, dan halal.

3. Indikator Kinerja Utama :

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Cara Perhitungan	PJ Data/Sumber Data
1	Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal	1	Jumlah SNI yang ditetapkan	Perhitungan: Jumlah SNI yang ditetapkan menjadi SNI (tahun n) Definisi: Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang berlaku secara nasional di Indonesia yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN)	PJ data: Dit. AK2H Sumber data: Dit. AK2H
		2	Jumlah rekomendasi hasil kaji ulang SNI	Perhitungan: Jumlah rekomendasi hasil kaji ulang SNI (tahun n) Definisi: Kaji ulang SNI adalah kegiatan pengecekan isi dan format SNI untuk ditetapkan kembali, diubah atau diabolisi dalam rangka menjaga kesesuaian SNI terhadap kepentingan nasional dan kebutuhan pasar, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan,	PJ data: Dit. AK2H Sumber data: Dit. AK2H

				inovasi dan teknologi; menilai kelayakan dan kekiniannya, serta menyesuaikan dengan ketentuan penulisan SNI.	
		3	Persentase tindak lanjut PNPS	Perhitungan: Jumlah PNPS tahun n yang ditindaklanjuti minimal sampai tahap rapat konsensus RSNI ---------- x 100% Jumlah total PNPS (tahun n) Definisi: Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) adalah usulan rancangan SNI dari pemangku kepentingan yang akan dirumuskan secara terencana, terpadu, dan sistematis.	PJ data: Dit. AK2H Sumber data: Dit. AK2H
		4	Persentase pemenuhan kewajiban internasional terkait pengembangan standar	Perhitungan: Jumlah tanggapan/vote ---------- x 100% Jumlah total ballot Definisi: Kewajiban internasional terkait pengembangan standar adalah tanggapan/vote Indonesia dalam forum pengembangan standar internasional	PJ data: Dit. AK2H Sumber data: Dit. AK2H
2	Meningkatkan pengembangan Standar Internasional bidang Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal	5	Jumlah usulan rancangan Standar Internasional yang diajukan oleh Indonesia	Perhitungan: Jumlah usulan rancangan standar Internasional yang diajukan Indonesia pada tahun n (kumulatif) Definisi: Usulan Rancangan Standar Internasional adalah usulan Standar yang diajukan menjadi Rancangan Standar Internasional	PJ data: Dit. AK2H Sumber data: Dit. AK2H

I.2 DIREKTORAT PENGEMBANGAN STANDAR MEKANIKA, ENERGI, ELEKTROTEKNIKA, TRANSPORTASI, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. Tugas : melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional, serta pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar sektor energi, elektroteknika, transportasi, dan telekomunikasi.

2. Fungsi :
   a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor mekanika dan material, energi baru terbarukan dan energi tak terbarukan, elektronika dan ketenagalistrikan, transportasi dan teknologi informasi;
   b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor mekanika dan material, energi baru terbarukan dan energi tak terbarukan, elektronika dan ketenagalistrikan, transportasi dan teknologi informasi;
   c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor mekanika dan material, energi baru terbarukan dan energi tak terbarukan, elektronika dan ketenagalistrikan, transportasi dan teknologi informasi; dan
   d. penyiapan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar sektor mekanika dan material, energi baru terbarukan dan energi tak terbarukan, elektronika dan ketenagalistrikan, transportasi dan teknologi informasi.

3. Indikator Kinerja Utama :

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Cara Perhitungan	PJ Data/Sumber Data
1	Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi	1	Jumlah SNI yang ditetapkan	Perhitungan: Jumlah SNI yang ditetapkan menjadi SNI (tahun n) Definisi: Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang berlaku secara nasional di Indonesia yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN)	PJ data: Dit. MEETTI Sumber data: Dit. MEETTI
		2	Jumlah rekomendasi hasil kaji ulang SNI	Perhitungan: Jumlah rekomendasi hasil kaji ulang SNI (tahun n) Definisi: Kaji ulang SNI adalah kegiatan pengecekan isi dan format SNI untuk ditetapkan kembali, diubah atau	PJ data: Dit. MEETTI Sumber data: Dit. MEETTI

				diabolisi dalam rangka menjaga kesesuaian SNI terhadap kepentingan nasional dan kebutuhan pasar, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi dan teknologi; menilai kelayakan dan kekiniannya, serta menyesuaikan dengan ketentuan penulisan SNI.	
		3	Persentase tindak lanjut PNPS	Perhitungan: Jumlah PNPS tahun n yang ditindaklanjuti minimal sampai tahap rapat konsensus RSNI ---------- x 100% Jumlah total PNPS (tahun n) Definisi: Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) adalah usulan rancangan SNI dari pemangku kepentingan yang akan dirumuskan secara terencana, terpadu, dan sistematis.	PJ data: Dit. MEETTI Sumber data: Dit. MEETTI
		4	Persentase pemenuhan kewajiban internasional terkait pengembangan standar	Perhitungan: Jumlah tanggapan/vote ---------- x 100% Jumlah total ballot Definisi: Kewajiban internasional terkait pengembangan standar adalah tanggapan/vote Indonesia dalam forum pengembangan standar internasional	PJ data: Dit. MEETTI Sumber data: Dit. MEETTI
2	Meningkatkan pengembangan Standar Internasional bidang Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi	5	Jumlah usulan rancangan Standar Internasional yang diajukan oleh Indonesia	Perhitungan: Jumlah usulan rancangan standar Internasional yang diajukan Indonesia pada tahun n (kumulatif) Definisi: Usulan Rancangan Standar Internasional adalah usulan Standar yang diajukan menjadi Rancangan Standar Internasional	PJ data: Dit. MEETTI Sumber data: Dit. MEETTI

I.3 DIREKTORAT PENGEMBANGAN STANDAR INFRASTRUKTUR, PENILAIAN KESESUAIAN, PERSONAL, DAN EKONOMI KREATIF

1. Tugas : melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional, serta pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar sektor infrastruktur, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, inovasi baru, dan aneka.

2. Fungsi :
   a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor infrastruktur, kebumian, kebencanaan, sistem manajamen, penilaian kesesuaian, jasa, personal, ekonomi kreatif, teknologi khusus, inovasi baru, dan aneka;
   b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor infrastruktur, kebumian, kebencanaan, sistem manajamen, penilaian kesesuaian, jasa, personal, ekonomi kreatif, teknologi khusus, inovasi baru, dan aneka;
   c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor infrastruktur, kebumian, kebencanaan, sistem manajamen, penilaian kesesuaian, jasa, personal, ekonomi kreatif, teknologi khusus, inovasi baru, dan aneka; dan
   d. penyiapan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar sektor infrastruktur, kebumian, kebencanaan, sistem manajamen, penilaian kesesuaian, jasa, personal, ekonomi kreatif, teknologi khusus, inovasi baru, dan aneka.

3. Indikator Kinerja Utama :

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Cara Perhitungan	PJ Data/Sumber Data
1	Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif	1	Jumlah SNI yang ditetapkan	Perhitungan: Jumlah SNI yang ditetapkan menjadi SNI (tahun n) Definisi: Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang berlaku secara nasional di Indonesia yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN)	PJ data: Dit. IPPE Sumber data: Dit. IPPE
		2	Jumlah rekomendasi hasil kaji ulang SNI	Perhitungan: Jumlah rekomendasi hasil kaji ulang SNI (tahun n) Definisi: Kaji ulang SNI adalah kegiatan pengecekan isi dan	PJ data: Dit. IPPE Sumber data: Dit. IPPE

				format SNI untuk ditetapkan kembali, diubah atau diabolisi dalam rangka menjaga kesesuaian SNI terhadap kepentingan nasional dan kebutuhan pasar, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi dan teknologi; menilai kelayakan dan kekiniannya, serta menyesuaikan dengan ketentuan penulisan SNI.	
		3	Persentase tindak lanjut PNPS	Perhitungan: Jumlah PNPS tahun n yang ditindaklanjuti minimal sampai tahap rapat konsensus RSNI ---------- x 100% Jumlah total PNPS (tahun n) Definisi: Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) adalah usulan rancangan SNI dari pemangku kepentingan yang akan dirumuskan secara terencana, terpadu, dan sistematis.	PJ data: Dit. IPPE Sumber data: Dit. IPPE
		4	Persentase pemenuhan kewajiban internasional terkait pengembangan standar	Perhitungan: Jumlah tanggapan/vote ---------- x 100% Jumlah total ballot Definisi: Kewajiban internasional terkait pengembangan standar adalah tanggapan/vote Indonesia dalam forum pengembangan standar internasional	PJ data: Dit. IPPE Sumber data: Dit. IPPE
2	Meningkatkan pengembangan Standar Internasional bidang Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian,	5	Jumlah usulan rancangan Standar Internasional yang diajukan oleh Indonesia	Perhitungan: Jumlah usulan rancangan standar Internasional yang diajukan Indonesia pada tahun n (kumulatif) Definisi: Usulan Rancangan Standar Internasional adalah usulan Standar yang diajukan menjadi Rancangan	PJ data: Dit. IPPE Sumber data: Dit. IPPE

	Personal, dan Ekonomi Kreatif			Standar Internasional	

II. DEPUTI BIDANG PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN

1. Tugas : melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penerapan standar dan penilaian kesesuaian.
2. Fungsi :
   a. penyusunan kebijakan di bidang pengembangan sistem, konsultasi, diseminasi, dan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian;
   b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem, konsultasi, diseminasi, dan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian;
   c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem, konsultasi, diseminasi, dan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian;
   d. pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan sistem, konsultasi, diseminasi, dan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian; dan
   e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.
3. Indikator Kinerja Utama :

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Cara Perhitungan	PJ Data/Sumber Data
1	Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar domestik dan global	1	Persentase pertumbuhan ekspor Produk Nasional yang didukung SNI, Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Metrologi (Standar Nasional Satuan Ukuran)	Perhitungan: (Jumlah ekspor Produk Nasional di dukung SNI, Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Metrologi thn n) - (Jumlah ekspor PN didukung SNI, Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Metrologi thn n-1) ---------- x 100% (Jumlah ekspor Produk Nasional di dukung SNI, Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Metrologi thn n) Definisi: Survei angka pertumbuhan ekspor terhadap sample klien LPK yang diakreditasi KAN yang terkait dengan sertifikasi 14001, 9001, 22000, SVLK, halal; laboratorium; Lembaga Inspeksi; Sertifikasi Produk;	PJ data: Pusrisbang Sumber data: Seluruh Unit Kerja

				SNSU	
		2	Persentase pertumbuhan produk ber-SNI di pasar retail dalam negeri	Perhitungan: (Jumlah produk bertanda SNI di pasar retail dalam negeri tahun n) - (Jumlah Produk bertanda SNI di pasar retail dalam negeri tahun n-1) ---------- x 100% (Jumlah Produk bertanda SNI di pasar retail dalam negeri tahun n) Definisi: Survei ke retail besar yang memiliki banyak cabang seluruh Indonesia (Hypermart, Transmart, Alfamart, Indomart) dikawasan Jabodetabek. Survei dilakukan pada beberapa produk ber SNI wajib untuk produk (makanan, minuman, helm, elektronik dan mainan) dan ber SNI tidak wajib (mie instan, kertas, bihun, mie kering dan lampu)	PJ data: Pusrisbang Sumber data: Seluruh Unit Kerja
		3	Indeks kepuasan masyarakat terhadap efektivitas Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Perhitungan: Survei persepsi masyarakat terhadap Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) menggunakan skala 1 – 5 Definisi: Survei yang dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap efektifitas Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Responden survei adalah stekholder SPK (Komite Teknis, Laboratorium Uji dan Laboratorium Kalibrasi, LSPro dan Industri penerap SNI, UKM Binaan BSN dan Lembaga Inspeksi, yang dilakukan dengan metode survei langsung dan tidak langsung dengan menggunakan kuisioner dengan minimal responden 100.	PJ data: Pusrisbang Sumber data: Seluruh Unit Kerja

2	Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuian	4	Persentase Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diterapkan	Perhitungan: Jumlah SNI yang diterapkan ---------- x 100% Jumlah total SNI yang aktif Definisi: SNI yang diterapkan adalah SNI yang diterapkan organisasi dibuktikan dengan sertifikat	PJ data: Dit. PPSPK Sumber data: Dit. PPSPK
		5	Jumlah organisasi yang menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI)	Perhitungan: Jumlah organisasi yang menerapkan SNI (tahun n+(n-1)) Definisi: Organisasi yang menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah organisasi yang menerapkan SNI dibuktikan dengan sertifikat dan berdasarkan kebijakan KL penerapannya	PJ data: Dit. PPSPK Sumber data: Dit. PPSPK
3	Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	6	Persentase produk bertanda SNI yang sesuai dengan persyaratan SNI	Perhitungan: Jumlah produk bertanda SNI yang sesuai dengan persyaratan SNI ---------- x 100% Jumlah total produk bertanda SNI Definisi: Efektifitas penerapan SNI dan Pemenuhan produk bertanda SNI yang sesuai dengan persyaratan SNI dilakukan melalui uji petik	PJ data: Dit. SPSPK Sumber data: Dit. SPSPK
		7	Jumlah keberterimaan sistem SPK di forum bilateral, regional, dan multilateral	Perhitungan: Jumlah keberterimaan sistem SPK di forum bilateral, regional, dan multilateral (kumulatif) Definisi: Keberterimaan Sistem SPK adalah keberterimaan atas posisi Indonesia dalam bidang SPK pada pasar	PJ data: Dit. SPSPK Sumber data: Dit. SPSPK

				global yang dimanfaatkan untuk menyusun Strategi Standardisasi Nasional dan/atau regulasi teknis yang dijalankan dalam rangka mendukung daya saing dan ekspansi produk unggulan nasional di pasar global	

II.1 DIREKTORAT SISTEM PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN

1. Tugas : melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan sistem dan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian.

2. Fungsi :
   a. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan skema penerapan standar sukarela dan penilaian kesesuaian, sistem pemberlakuan standar wajib dan penilaian kesesuaian, pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian;
   b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan skema penerapan standar sukarela dan penilaian kesesuaian, sistem pemberlakuan standar wajib dan penilaian kesesuaian, pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian;
   c. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan skema penerapan standar sukarela dan penilaian kesesuaian, sistem pemberlakuan standar wajib dan penilaian kesesuaian, pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian, serta pemenuhan kewajiban internasional; dan
   d. penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional bidang pengembangan sistem dan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian.

3. Indikator Kinerja Utama :

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Cara Perhitungan	PJ Data/Sumber Data
1	Meningkatkan pengembangan skema penerapan standar sukarela dan penilaian kesesuaian	1	Jumlah skema penerapan SNI yang ditetapkan	Perhitungan: Jumlah skema penerapan SNI yang ditetapkan (kumulatif pada tahun ke-n) Definisi: Skema penerapan SNI adalah aturan, prosedur, dan manajemen yang berlaku untuk melaksanakan	PJ data: Dit. SPSPK Sumber data: Dit. SPSPK

				Penilaian kesesuaian terhadap Barang, Jasa, Sistem, Proses, dan/atau Personel dengan Persyaratan yang terdapat pada SNI.	
2	Meningkatkan sistem pemberlakuan standar wajib dan penilaian kesesuaian	2	Persentase jumlah notifikasi dan penanganan enquiry yang di tanggapi	Perhitungan: Jumlah regulasi teknis Indonesia yang dinotifikasi dan enquiry yang ditanggapi ---------- x 100% Jumlah regulasi teknis Indonesia dan enquiry yang masuk Definisi: Notifikasi adalah suatu kewajiban terkait transparansi bagi anggota WTO untuk menyampaikan informasi kepada Sekretariat WTO terkait peraturan yang akan diberlakukan dalam suatu anggota WTO yang diperkirakan dapat berpengaruh terhadap pcrdagangan anggota WTO yang lain. Enquiry adalah permintaan informasi dan dokumen terkait regulasi teknis, standar, dan prosedur penilaian kesesuaian, baik yang akan maupun telah ditetapkan, serta partisipasi dalam perjanjian yang terkait dengan standardisasi baik di tingkat bilateral maupun plurilateral, dan dengan badan standardisasi dan prosedur penilaian kesesuaian di tingkat regional dan internasional	PJ data: Dit. SPSPK Sumber data: Dit. SPSPK
3	Meningkatkan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian	3	Persentase produk bertanda SNI yang sesuai dengan persyaratan SNI	Perhitungan: (Jumlah produk uji petik yang sesuai persyaratan SNI tahun n) ---------- x 100% (Jumlah produk uji petik tahun n)	PJ data: Dit. SPSPK Sumber data: Dit. SPSPK

				Definisi: Efektifitas penerapan SNI dan Pemenuhan produk bertanda SNI yang sesuai dengan persyaratan SNI dilakukan melalui uji petik	
4	Meningkatkan pemenuhan kewajiban internasional bidang standar dan penilaian kesesuaian	4	Jumlah Keberterimaan Sistem SPK di Forum Bilateral, Regional dan Multilateral	Perhitungan: Jumlah keberterimaan sistem SPK di forum bilateral, regional, dan multilateral (kumulatif) Definisi: Keberterimaan Sistem SPK adalah keberterimaan atas posisi Indonesia dalam bidang SPK pada pasar global yang dimanfaatkan untuk menyusun Strategi Standardisasi Nasional dan/atau regulasi teknis yang dijalankan dalam rangka mendukung daya saing dan ekspansi produk unggulan nasional di pasar global	PJ data: Dit. SPSPK Sumber data: Dit. SPSPK
		5	Persentase kepentingan Indonesia di bidang SPK yang diperjuangkan di forum Bilateral, Regional dan Multilateral	Perhitungan: (Jumlah kepentingan Indonesia di bidang SPK yang diperjuangkan di forum Bilateral, Regional dan Multilateral) ---------- x 100% (Jumlah kepentingan Indonesia di bidang SPK forum Bilateral, Regional dan Multilateral) Definisi: Terpenuhinya kepentingan Indonesia di bidang SPK di forum Internasional dalam bentuk peningkatan daya saing produk Indonesia yang dilakukan melalui perjanjian baik bilateral maupun regional dan multilateral	PJ data: Dit. SPSPK Sumber data: Dit. SPSPK

II.2 DIREKTORAT PENGUATAN PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN

1. Tugas : melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang konsultasi dan diseminasi penerapan standar dan penilaian kesesuaian.

2. Fungsi :
   a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang diseminasi standar dan penilaian kesesuaian, fasilitasi pelaku usaha dan fasilitasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam penerapan standar dan penilaian kesesuaian;
   b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang diseminasi standar dan penilaian kesesuaian, fasilitasi pelaku usaha dan fasilitasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam penerapan standar dan penilaian kesesuaian;
   c. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang diseminasi standar dan penilaian kesesuaian, fasilitasi pelaku usaha dan fasilitasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam penerapan standar dan penilaian kesesuaian; dan
   d. penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional bidang diseminasi dan konsultasi penerapan standar dan penilaian kesesuaian.

3. Indikator Kinerja Utama :

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Cara Perhitungan	PJ Data/Sumber Data
1	Meningkatkan penerapan SNI oleh pelaku usaha/organisasi	1	Persentase Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diterapkan	Perhitungan: Jumlah SNI yang diterapkan ---------- x 100% Jumlah total SNI yang aktif Definisi: SNI yang diterapkan adalah SNI yang diterapkan organisasi dibuktikan dengan sertifikat	PJ data: Dit. PPSPK Sumber data: Dit. PPSPK
		2	Jumlah organisasi yang menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI)	Perhitungan: Jumlah organisasi yang menerapkan SNI (tahun n+(n-1)) Definisi: Organisasi yang menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah organisasi yang menerapkan	PJ data: Dit. PPSPK Sumber data: Dit. PPSPK

				SNI dibuktikan dengan sertifikat dan berdasarkan kebijakan K/L penerapannya	
		3	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam penerapan SNI	Perhitungan: Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam penerapan SNI (tahun n+(n-1)) Definisi: Fasilitasi pelaku usaha dalam penerapan SNI adalah pelaku usaha yang dibina penerapan SNI	PJ data: Dit. PPSPK Sumber data: Dit. PPSPK
		4	Jumlah pelaku usaha penerap SNI yang menjadi role model penerapan SNI	Perhitungan: Jumlah pelaku usaha penerap SNI yang menjadi role model penerapan SNI (tahun n=(n+1)) Definisi: Role model penerapan SNI adalah perusahaan/organisasi yang berhasil memperoleh sertifikat dan perusahaan/organisasi penerima SNI Award	PJ data: Dit. PPSPK Sumber data: Dit. PPSPK
		5	Jumlah SNI yang didiseminasikan	Perhitungan: Jumlah SNI yang didiseminasikan (tahun n+(n-1)) Definisi: SNI yang didiseminasikan adalah SNI yang didiseminasikan baik melalui pertemuan maupun media lainnya	PJ data: Dit. PPSPK Sumber data: Dit. PPSPK
2	Meningkatkan kemampuan LPK dalam mendukung penerapan SNI	6	Jumlah LPK yang berhasil difasilitasi dalam mendukung penerapan SNI dan siap diakreditasi KAN	Perhitungan: Jumlah LPK yang berhasil difasilitasi dalam mendukung penerapan SNI dan siap di akreditasi KAN (tahun n) Definisi: Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang difasilitasi oleh BSN dan siap di akreditasi oleh	PJ data: Dit. PPSPK Sumber data: Dit. PPSPK

				Komite Akreditasi Nasional (KAN) dalam rangka menambah ruang lingkup akreditasi atau menambah ketersediaan LPK	

III. DEPUTI BIDANG AKREDITASI

1. Tugas : melaksanakan penyusunan dan pelaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.

2. Fungsi :
   a. penyusunan kebijakan di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi;
   b. pelaksanaan kebijakan di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi;
   c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi;
   d. pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian; dan
   e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

3. Indikator Kinerja Utama :

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Cara Perhitungan	PJ Data/Sumber Data
1	Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar domestik dan global	1	Persentase pertumbuhan ekspor Produk Nasional yang didukung SNI, Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Metrologi (Standar Nasional Satuan Ukuran)	Perhitungan: (Jumlah ekspor Produk Nasional di dukung SNI, Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Metrologi thn n) - (Jumlah ekspor PN didukung SNI, Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Metrologi thn n-1) ---------- x 100% (Jumlah ekspor Produk Nasional di dukung SNI, Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Metrologi tahun n)	PJ data: Pusrisbang Sumber data: Seluruh Unit Kerja

				Definisi: Survei angka pertumbuhan ekspor terhadap sample klien LPK yang diakreditasi KAN yang terkait dengan sertifikasi 14001, 9001, 22000, SVLK, halal; laboratorium; Lembaga Inspeksi; Sertifikasi Produk; SNSU	
		2	Persentase pertumbuhan produk ber-SNI di pasar retail dalam negeri	Perhitungan: (Jumlah produk bertanda SNI di pasar retail dalam negeri tahun n) - (Jumlah Produk bertanda SNI di pasar retail dalam negeri tahun n-1) ---------- x 100% (Jumlah Produk bertanda SNI di pasar retail dalam negeri tahun n) Definisi: Survei ke retail besar yang memiliki banyak cabang seluruh Indonesia (Hypermart, Transmart, Alfamart, Indomart) dikawasan Jabodetabek. Survei dilakukan pada beberapa produk ber SNI wajib untuk produk (makanan, minuman, helm, elektronik dan mainan) dan ber SNI tidak wajib (mie instan, kertas, bihun, mie kering dan lampu)	PJ data: Pusrisbang Sumber data: Seluruh Unit Kerja
		3	Indeks kepuasan masyarakat terhadap efektivitas Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Perhitungan: Survei persepsi masyarakat terhadap Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) menggunakan skala 1 – 5 Definisi: Survei yang dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap efektifitas Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Responden survei adalah stekholder SPK (Komite Teknis, Laboratorium Uji dan Laboratorium	PJ data: Pusrisbang Sumber data: Seluruh Unit Kerja

				Kalibrasi, LSPro dan Industri penerap SNI, UKM Binaan BSN dan Lembaga Inspeksi, yang dilakukan dengan metode survei langsung dan tidak langsung dengan menggunakan kuisioner dengan minimal responden 100.	
2	Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Akreditasi	4	Jumlah Lembaga Penilaian Kesesuian (LPK) yang di akreditasi	Perhitungan: Jumlah LPK (Lembaga Penilaian Kesesuaian) yang di akreditasi oleh KAN (kumulatif) Definisi: Penilaian Kesesuaian mencakup kelembagaan dan proses penilaian untuk menyatakan kesesuaian suatu kegiatan atau suatu produk terhadap SNI tertentu. Sesuai PP 102/2000, Komite Akreditasi Nasional (KAN) diberikan tugas untuk memberikan akreditasi kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian (Laboratorium Penguji, Laboratorium Kalibrasi, Laboratorium Medik, Lembaga Inspeksi, dan Lembaga Sertifikasi)	PJ Data: Dit AL, Dit ALIS Sumber Data: Dit AL, Dit ALIS
		5	Jumlah pengakuan akreditasi secara internasional	Perhitungan: Jumlah pengakuan akreditasi (Laboratorium dan Lembaga Inspeksi) secara internasional (kumulatif) Definisi: Pengakuan akreditasi secara internasional merupakan pengakuan yang diberikan oleh organisasi internasional/regional (Mutual Recognition Arrangement/MRA APAC-ILAC, PAC MLA) kepada badan akreditasi dalam menjalankan kegiatan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian	PJ Data: Dit Sishar Sumber Data: Dit AL, Dit ALIS, Dit Sishar
		6	Jumlah skema akreditasi untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan	Perhitungan: Jumlah kumulatif skema akreditasi Laboratorium, lembaga inspeksi, dan lembaga sertifikasi yang dikembangkan dan dipelihara untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan	PJ Data: Dit Sishar Sumber Data: Dit Sishar

				Definisi: Skema akreditasi adalah aturan, prosedur, dan manajemen yang berlaku untuk melaksanakan penilaian terhadap LPK (laboratorium, lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi)	

III.1 DIREKTORAT SISTEM DAN HARMONISASI AKREDITASI

1. Tugas : melaksanakan penyusunan kebijakan di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi, dan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sistem dan harmonisasi akreditasi.

2. Fungsi :
   a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi;
   b. pengembangan dan pemeliharaan sistem di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi;
   c. penyiapan pelaksanaan harmonisasi di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi;
   d. penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang sistem dan harmonisasi akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi;
   e. pelaksanaan kesekretariatan Komite Akreditasi Nasional; dan
   f. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sistem dan harmonisasi akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi.

3. Indikator Kinerja Utama :

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Cara Perhitungan	PJ Data/Sumber Data
1	Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Sistem dan Harmonisasi Akreditasi	1	Jumlah pengakuan Skema akreditasi secara internasional	Perhitungan: Jumlah kumulatif skema akreditasi Laboratorium, lembaga inspeksi, dan lembaga sertifikasi yang diakui secara internasional	PJ Data: Dit. Sishar Sumber Data: Dit. Sishar

				Definisi: Pengakuan skema akreditasi secara internasional merupakan pengakuan terhadap skema akreditasi Laboratorium, lembaga inspeksi, dan lembaga sertifikasi secara internasional melalui perjanjian MRA/MLA dengan organisasi/lembaga akreditasi internasional yang relevan, yaitu APAC, IAF dan ILAC	
		2	Jumlah skema akreditasi laboratorium, lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan	Perhitungan: Jumlah kumulatif skema akreditasi Laboratorium, lembaga inspeksi, dan lembaga sertifikasi yang dikembangkan dan dipelihara untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan Definisi: Skema akreditasi adalah aturan, prosedur, dan manajemen yang berlaku untuk melaksanakan penilaian terhadap LPK (laboratorium, lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi)	PJ Data: Dit. Sishar Sumber Data: Dit. Sishar
		3	Persentase Pemeliharaan kebijakan akreditasi laboratorium, lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi	Perhitungan: Jumlah kebijakan yang dikaji dan dikembangkan ---------- x 100% Jumlah total kebijakan yang tersedia dan dikembangkan Definisi: Pemeliharaan Kebijakan akreditasi adalah kegiatan untuk menjaga/mempertahankan/ menyediakan kebijakan akreditasi dengan cara pengkajian/ pengembangan kebijakan akreditasi laboratorium, lembaga inspeksi, dan lembaga sertifikasi	PJ Data: Dit. Sishar Sumber Data: Dit. Sishar

III.2 DIREKTORAT AKREDITASI LABORATORIUM

1. Tugas : melaksanakan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, penyelenggara uji profisiensi, dan produsen bahan acuan.

2. Fungsi :
   a. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, penyelenggara uji profisiensi, dan produsen bahan acuan;
   b. pelaksanaan proses akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, penyelenggara uji profisiensi, dan produsen bahan acuan; dan
   c. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, penyelenggara uji profisiensi, dan produsen bahan acuan.

3. Indikator Kinerja Utama :

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Cara Perhitungan	PJ Data/Sumber Data
1	Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Akreditasi Laboratorium	1	Jumlah Laboratorium, Penyelenggara Uji Profisiensi dan Produsen Bahan Acuan yang di akreditasi	Perhitungan: Jumlah LPK (Laboratorium, Penyelenggara Uji Profisiensi dan Produsen Bahan A Definisi: Penilaian Kesesuaian mencakup kelembagaan dan proses penilaian untuk menyatakan kesesuaian suatu kegiatan atau suatu produk terhadap SNI tertentu. Sesuai PP 102/2000, Komite Akreditasi Nasional (KAN) diberikan tugas untuk memberikan akreditasi kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian (Laboratorium Penguji, Labortaorium Kalibrasi, Laboratorium Medik, Lembaga Inspeksi, dan Lembaga Sertifikasi)	PJ Data: Dit AL Sumber Data: Dit AL
		2	Jumlah pengakuan akreditasi Laboratorium, Penyelenggara Uji Profisiensi dan Produsen Bahan Acuan secara internasional	Perhitungan: Jumlah pengakuan akreditasi (Laboratorium, Penyelenggara Uji Profisiensi dan Produsen Bahan Acuan) secara internasional (kumulatif)	PJ Data: Dit AL Sumber Data: Dit AL

				Definisi: Pengakuan akreditasi secara internasional merupakan pengakuan yang diberikan oleh organisasi internasional/regional (Mutual Recognition Arrangement/MRA APAC-ILAC) kepada badan akreditasi dalam menjalankan kegiatan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian	
		3	Persentase Proses waktu akreditasi Laboratorium, Penyelenggara Uji Profisiensi dan Produsen Bahan Acuan kurang dari 12 bulan	Perhitungan: Jumlah proses waktu akreditasi (Laboratorium, Penyelenggara Uji Profisiensi dan Produsen Bahan Acuan) >12 bulan ---------- x 100% Jumlah total akreditasi yang dilayanani (tahun n) Definisi: Proses waktu akreditasi mulai dari persetujuan tim asesmen saat permohonan akreditasi sampai dengan keputusan akreditasi oleh KAN yang diselesaikan kurang dari 12 bulan	PJ Data: Dit AL Sumber Data: Dit AL

III.3 DIREKTORAT AKREDITASI LEMBAGA INSPEKSI DAN LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Tugas : melaksanakan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi.
2. Fungsi :
   a. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi;
   b. pelaksanaan proses akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi; dan
   c. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi.

3. Indikator Kinerja Utama :

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Cara Perhitungan	PJ Data/Sumber Data
1	Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi	1	Jumlah Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi yang di akreditasi	Perhitungan: Jumlah LPK (Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi) yang di akreditasi oleh KAN (kumulatif) Definisi: Penilaian Kesesuaian mencakup kelembagaan dan proses penilaian untuk menyatakan kesesuaian suatu kegiatan atau suatu produk terhadap SNI tertentu. Sesuai PP 102/2000, Komite Akreditasi Nasional (KAN) diberikan tugas untuk memberikan akreditasi kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian (Laboratorium Penguji, Labortaorium Kalibrasi, Laboratorium Medik, Lembaga Inspeksi, dan Lembaga Sertifikasi)	PJ Data:Dit ALIS Sumber Data: Dit ALIS
		2	Jumlah pengakuan akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi secara internasional	Perhitungan: Jumlah pengakuan akreditasi (Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi) secara internasional (kumulatif) Definisi: Pengakuan akreditasi secara internasional merupakan pengakuan yang diberikan oleh organisasi internasional/regional (PAC MLA) kepada badan akreditasi dalam menjalankan kegiatan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian	PJ Data:Dit ALIS Sumber Data: Dit ALIS
		3	Persentase Proses waktu akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi kurang dari 12 bulan	Perhitungan: Jumlah proses waktu akreditasi (Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi) >12 bulan ---------- x 100% Jumlah total akreditasi yang dilayanani (tahun n)	PJ Data:Dit ALIS Sumber Data: Dit ALIS

				Definisi: Proses waktu akreditasi mulai dari persetujuan tim asesmen saat permohonan akreditasi sampai dengan keputusan akreditasi oleh KAN yang diselesaikan kurang dari 12 bulan	

IV. DEPUTI BIDANG STANDAR NASIONAL SATUAN UKURAN

1. Tugas : melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran.

2. Fungsi :
   a. penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran fisika, radiasi, kimia, biologi dan sistem ketertelusuran pengukuran;
   b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran fisika, radiasi, kimia, biologi dan sistem ketertelusuran pengukuran;
   c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran fisika, radiasi, kimia, biologi dan sistem ketertelusuran pengukuran;
   d. pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran fisika, radiasi, kimia, biologi dan sistem ketertelusuran pengukuran; dan
   e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

3. Indikator Kinerja Utama :

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Cara Perhitungan	PJ Data/Sumber Data
1	Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar domestik dan global	1	Persentase pertumbuhan ekspor Produk Nasional yang didukung SNI, Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Metrologi (Standar Nasional Satuan Ukuran)	Perhitungan: (Jumlah ekspor Produk Nasional di dukung SNI, Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Metrologi thn n) - (Jumlah ekspor PN didukung SNI, Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Metrologi thn n-1) ---------- x 100% (Jumlah ekspor Produk Nasional di dukung SNI, Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Metrologi thn n) Definisi: Survei angka pertumbuhan ekspor terhadap sample klien LPK yang diakreditasi KAN yang terkait dengan sertifikasi 14001, 9001, 22000, SVLK, halal; laboratorium; Lembaga Inspeksi; Sertifikasi Produk; SNSU	PJ data: Pusrisbang Sumber data: Seluruh Unit Kerja
		2	Persentase pertumbuhan produk ber-SNI di pasar retail dalam negeri	Perhitungan: (Jumlah produk bertanda SNI di pasar retail dalam negeri tahun n) - (Jumlah Produk bertanda SNI di pasar retail dalam negeri tahun n-1) ---------- x 100% (Jumlah Produk bertanda SNI di pasar retail dalam negeri tahun n) Definisi: Survei ke retail besar yang memiliki banyak cabang seluruh Indonesia (Hypermart, Transmart, Alfamart, Indomart) dikawasan Jabodetabek. Survei dilakukan pada beberapa produk ber SNI wajib untuk produk (makanan, minuman, helm,	PJ data: Pusrisbang Sumber data: Seluruh Unit Kerja

				elektronik dan mainan) dan ber SNI tidak wajib (mie instan, kertas, bihun, mie kering dan lampu)	
		3	Indeks kepuasan masyarakat terhadap efektivitas Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Perhitungan: Survei persepsi masyarakat terhadap Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) menggunakan skala 1 – 5 Definisi: Survei yang dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap efektifitas Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Responden survei adalah stekholder SPK (Komite Teknis, Laboratorium Uji dan Laboratorium Kalibrasi, LSPro dan Industri penerap SNI, UKM Binaan BSN dan Lembaga Inspeksi, yang dilakukan dengan metode survei langsung dan tidak langsung dengan menggunakan kuisioner dengan minimal responden 100.	PJ data: Pusrisbang Sumber data: Seluruh Unit Kerja
2	Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran	4	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang tertelusur ke Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU)	Perhitungan: Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang tertelusur ke SI melalui Standar Nasional Satuan Ukuran (thn n) Definisi: Sertifikat kalibrasi yang tertelusur adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Lab kalibrasi terakreditasi KAN yang tertelusur ke SI melalui SNSU	PJ data: Dit. MRB, Dit. TK Sumber Data: Dit. MRB, Dit. TK
		5	Jumlah Kebijakan SNSU	Perhitungan: Jumlah Kebijakan SNSU (tahun n) Definisi: Berupa kebijakan SNSU yang menjadi acuan secara nasional	PJ data: Dit. MRB, Dit. TK Sumber Data: Dit. MRB, Dit. TK

		6	Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang dihasilkan dan diakui secara internasional	Perhitungan: Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi Definisi: Kemampuan kalibrasi dan pengukuran yang tersedia untuk pelanggan sebagaimana dipublikasikan dalam basis DataKCDB dari CIPM MRA	PJ data: Dit. MRB, Dit. TK Sumber Data: Dit. MRB, Dit. TK
		7	Jumlah lingkup kemampuan pengukuran dan kalibrasi	Perhitungan: Jumlah lingkup kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang dimiliki lingkup Deputi SNSU (kumulatif) Definisi: Jumlah keseluruhan kemampuan kalibrasi dan pengukuran lingkup Deputi SNSU	PJ data: Dit. MRB, Dit. TK Sumber Data: Dit. MRB, Dit. TK

IV .1 DIREKTORAT STANDAR NASIONAL SATUAN UKURAN MEKANIKA, RADIASI, DAN BIOLOGI

1. Tugas : melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan serta pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran mekanika, radiasi, dan biologi.

2. Fungsi :
   a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran massa, panjang, akustik dan vibrasi, serta radiasi dan biologi;
   b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran massa, panjang, akustik dan vibrasi, serta radiasi dan biologi;
   c. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan standar nasional satuan dan sistem ketertelusuran pengukuran massa, panjang, akustik dan vibrasi, serta radiasi dan biologi; dan
   d. penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran massa, panjang, akustik dan vibrasi, serta radiasi dan biologi.

3. Indikator Kinerja Utama :

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Cara Perhitungan	PJ Data/Sumber Data
1	Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran	1	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang diterbitkan	Perhitungan: Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang diterbitkan Direktorat SNSU Mekanika, Radiasi dan Biologi (tahun n) Definisi: Sertifikat Kalibrasi yang diterbitkan adalah sertifikat hasil kalibrasi yang dikeluarkan oleh Direktorat SNSU Mekanika, Radiasi dan Biologi	PJ data: Dit. MRB Sumber Data: Dit. MRB
		2	Jumlah Kebijakan Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi dan Biologi	Perhitungan: Jumlah Kebijakan SNSU untuk lingkup Mekanika, Radiasi dan Biologi (tahun n) Definisi: Berupa kebijakan SNSU yang menjadi acuan secara nasional untuk lingkup Mekanika, Radiasi dan Biologi	PJ data: Dit. MRB Sumber Data: Dit. MRB
		3	Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang dihasilkan dan diakui secara internasional bidang Mekanika, Radiasi dan Biologi	Perhitungan: Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang dihasilkan dan diakui secara internasional bidang Mekanika, Radiasi dan Biologi, yang dapat dilihat pada website BIPM (kumulatif) Definisi: Kemampuan kalibrasi dan pengukuran yang tersedia untuk pelanggan khususnya untuk lingkup Mekanika, Radiasi dan Biologi: sebagaimana dipublikasikan dalam basis DataKCDB dari CIPM MRA	PJ data: Dit. MRB Sumber Data: Dit. MRB

		4	Jumlah lingkup kemampuan pengukuran dan kalibrasi bidang Mekanika, Radiasi dan Biologi	Perhitungan: Jumlah lingkup kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang dimiliki Direktorat SNSU Mekanika, Radiasi dan Biologi. (kumulatif) Definisi: Keseluruhan kemampuan kalibrasi dan pengukuran Direktorat SNSU Mekanika, Radiasi dan Biologi.	PJ data: Dit. MRB Sumber Data: Dit. MRB
		5	Jumlah posisi dan peran strategis dalam organisasi metrologi ilmiah di tingkat regional dan internasional	Perhitungan: Jumlah posisi dan peran strategis dalam organisasi metrologi ilmiah di tingkat regional dan internasional (tahun n) Definisi: Posisi strategis diantaranya adalah sebagi contoh ketua Technical Committe, Ketua Focus Group, Narasumber, reviewer, asesor pada organisasi metrologi ilmiah di tingkat regional dan internasional.	PJ data: Dit. MRB Sumber Data: Dit. MRB

IV .2 DIREKTORAT STANDAR NASIONAL SATUAN UKURAN TERMOELEKTRIK DAN KIMIA

1. Tugas : melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan serta pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran termoelektrik dan kimia.

2. Fungsi :
   a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran suhu, fotometri dan radiometri, kelistrikan dan waktu, serta kimia;
   b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran suhu, fotometri dan radiometri, kelistrikan dan waktu, serta kimia;
   c. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan standar nasional satuan dan sistem ketertelusuran pengukuran suhu, fotometri dan radiometri, kelistrikan dan waktu, serta kimia; dan
   d. penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengelolaan standar nasional

satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran suhu, fotometri dan radiometri, kelistrikan dan waktu, serta kimia.

3. Indikator Kinerja Utama :

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Cara Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran	1	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang diterbitkan	Perhitungan: Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang diterbitkan Direktorat SNSU termoelektrik dan Kimia (thn n) Definisi: Sertifikat Kalibrasi yang diterbitkan adalah sertifikat hasil kalibrasi yang dikeluarkan oleh Direktorat SNSU Termoelektrik dan Kimia	PJ data: Dit. TK Sumber Data: Dit. TK
		2	Jumlah Kebijakan Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia	Perhitungan: Jumlah Kebijakan SNSU untuk lingkup Termoelektrik dan Kimia (tahun n) Definisi: Berupa kebijakan SNSU yang menjadi acuan secara nasional untuk lingkup Termoelektrik dan Kimia	PJ data: Dit. TK Sumber Data: Dit. TK
		3	Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang dihasilkan dan diakui secara internasional bidang Termoelektrik dan Kimia	Perhitungan: Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang dihasilkan dan diakui secara internasional bidang Termoelektrik dan Kimia, yang dapat dilihat pada website BIPM (kumulatif) Definisi: Kemampuan kalibrasi dan pengukuran yang tersedia untuk pelanggan khususnya untuk lingkup Termoelektrik dan Kimia	PJ data: Dit. TK Sumber Data: Dit. TK

				sebagaimana dipublikasikan dalam basis Data KCDB dari CIPM MRA	
		4	Jumlah lingkup kemampuan pengukuran dan kalibrasi bidang Termoelektrik dan Kimia	Perhitungan: Jumlah lingkup kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang dimiliki Direktorat SNSU Termoelektrik dan Kimia (kumulatif). Definisi: Keseluruhan kemampuan kalibrasi dan pengukuran dari Direktorat SNSU Termoelektrik dan Kimia	PJ data: Dit. TK Sumber Data: Dit. TK
		5	Jumlah posisi dan peran strategis dalam organisasi metrologi ilmiah di tingkat regional dan internasional	Perhitungan: Jumlah posisi dan peran strategis dalam organisasi metrologi ilmiah di tingkat regional dan internasional (tahun n) Definisi: Posisi strategis diantaranya adalah sebagi contoh ketua Technical Committe, Ketua Focus Group, Narasumber, reviewer, asesor pada organisasi metrologi ilmiah di tingkat regional dan internasional.	PJ data: Dit. TK Sumber Data: Dit. TK

V. SEKRETARIAT UTAMA

1. Tugas : melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN.

2. Fungsi :
   a. koordinasi kegiatan di lingkungan BSN;
   b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran BSN;
   c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi BSN;
   d. pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana;
   e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;

f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara atau kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

3. Indikator Kinerja Utama :

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Cara Perhitungan	PJ Data/Sumber Data
1	Meningkatkan kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi yang profesional	1	Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi BSN	Perhitungan: Hasil Penilaian lembar kerja evaluasi Reformasi Birokrasi dari KemenPANRB Definisi: Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pengukuran penilaian Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh KemenPANRB menggunakan penilaian Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil.	PJ Data: Biro SDMOH, Inspektorat Sumber Data: Biro SDMOH, Inspektorat
		2	Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN	Perhitungan: Hasil Penilaian lembar kerja evaluasi AKIP dari KemenPANRB Definisi: Evaluasi AKIP dilakukan dan dinilai oleh KemenPANRB dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas atas outcome terhadap penggunaan anggaran. Penilaian dilakukan terhadap 5 komponen: Perencanaan Kinerja (35%), Pengukuran Kinerja (20%), Pelaporan Kinerja (15%), Evaluasi internal (10%), dan Capaian Kinerja (20%).	PJ Data: Biro PKU, Inspektorat Sumber Data: Biro PKU, Inspektorat

		3	Opini atas laporan keuangan BSN	Perhitungan: Opini atas Laporan Keuangan tahun n-1 yang dikeluarkan oleh BPK Definisi: Opini atas Laporan Keuangan n-1 yang dikeluarkan oleh BPK setetelah dilakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan sekali dalam setahun.	PJ Data: Biro PKU, Inspektorat Sumber Data: Biro PKU, Inspektorat
		4	Persentase Penerapan Budaya Kerja BSN	Perhitungan: Jumlah nilai penerapan budaya kerja unit ---------- x 100% Jumlah unit kerja yang dinilai Definisi: Penilaian penerapan budaya kerja unit kerja di lingkungan BSN dengan kriteria/metode kontes antar unit kerja	PJ Data: Biro SDMOH Sumber Data: Biro SDMOH
		5	Tingkat citra kelembagaan	Perhitungan: Hasil survey terhadap stakeholder BSN tentang tanggapan mereka terhadap BSN (skala 1-5) Definisi: Citra kelembagaan adalah tingkat gambaran mental seseorang/gambaran kesan seseorang terhadap BSN	PJ Data: Biro HKLI Sumber Data: Biro HKLI
		6	Indeks kepuasan layanan internal lingkup Settama	Perhitungan: Hasil survey layanan internal lingkup Settama (skala 1-5) Definisi: Survei untuk mengukur kepuasan layanan lingkup Settama yang ditujukan kepada Unit Kerja di lingkungan BSN	PJ Data: Biro HKLI Sumber Data: Biro HKLI

2	Meningkatkan kinerja pengelolaan perencanaan, keuangan dan umum	7	Persentase realisasi anggaran BSN	Perhitungan: Juml realisasi anggaran BSN (SP2D) ---------- x 100% Juml pagu anggaran BSN Definisi: Anggaran BSN tahun berjalan sesuai DIPA/RKAKL yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan	PJ Data: Biro PKU Sumber Data: Biro PKU
		8	Persentase kesesuaian penyusunan dan ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja	Perhitungan: Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja BSN (tahun n-1) yang disampaikan tepat waktu ---------- x 100% Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja BSN (tahun n-1) yang disusun Definisi: Laporan Keuangan merupakan pertanggung jawaban keuangan K/L meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan yang ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.	PJ Data: Biro PKU Sumber Data: Biro PKU
3	Meningkatkan kinerja pengelolaan SDM, Organisasi dan Hukum	9	Persentase pemenuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti program peningkatan kompetensi	Perhitungan: Jumlah ASN yg mengikuti program peningkatan kompetensi minimal 20 jam/thn ---------- x 100% Jumlah total ASN BSN	PJ Data: Biro SDMOH Sumber Data: Biro SDMOH

				Definisi: Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti program peningkatan kompetensi minimal 20 jam/thn.	
		10	Jumlah peraturan perundang – undangan di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuian (SPK) yang ditetapkan	Perhitungan: Jumlah peraturan perundang – undangan yang ditetapkan (tahun n) Definisi: Peraturan perundang – undangan yang ditetapkan	PJ Data: Biro SDMOH Sumber Data: Biro SDMOH
4	Meningkatkan kinerja pengelolaan Humas, Kerjasama dan Layanan Informasi	11	Jumlah Publikasi Kelembagaan	Perhitungan: Jumlah Publikasi Kelembagaan (tahun n) Definisi: Publikasi Kelembagaan adalah suatu proses penyampaian pesan kelembagaan kepada publiknya yang lebih banyak disampaikan melalui media massa. Publikasi kelembagaan BSN terdiri dari artikel berita (media massa umum, website BSN, majalah SNI Valuasi) dan kalender BSN	PJ Data: Biro HKLI Sumber Data: Biro HKLI
		12	Persentase Kerjasama Kelembagaan yang ditindaklanjuti	Perhitungan: Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti pada tahun n ---------- x 100% Jumlah kerjasama sampai tahun n-1 Definisi: Kerjasama kelembagaan yang ditindaklanjuti atau diimplementasikan ke dalam program nyata pada kedua belah pihak penandatangan kerjasama	PJ Data: Biro HKLI Sumber Data: Biro HKLI
		13	Jumlah pengunjung Sistem informasi SPK	Perhitungan: Jumlah pengunjung Sistem informasi SPK (tahun n)	PJ Data: Pusdatin Sumber Data:

				Definisi: Pengguna Sistem Informasi SPK antara lain SNI Corner, Lite, pengunjung perpustakaan, penyebarluasan publikasi, pengunjung KLT, pameran	Pusdatin, Biro HKLI

V .1 BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN DAN UMUM

1. Tugas : melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pembinaan dan pemberian dukungan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara atau kekayaan negara serta pelayanan pengadaan barang/jasa.
2. Fungsi :
   a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan kinerja;
   b. pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi pelaporan keuangan, dan penerimaan negara bukan pajak;
   c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dan keprotokolan; dan
   d. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa.
3. Indikator Kinerja Utama :

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Cara Perhitungan	PJ Data/Sumber Data
1	Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi yang profesional	1	Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN	Perhitungan: Hasil Penilaian lembar kerja evaluasi AKIP dari KemenPANRB Definisi: Evaluasi AKIP dilakukan dan dinilai oleh KemenPANRB dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas atas outcome terhadap penggunaan anggaran. Penilaian dilakukan terhadap 5 komponen: Perencanaan Kinerja (35%), Pengukuran Kinerja (20%), Pelaporan Kinerja (15%), Evaluasi internal (10%), dan Capaian Kinerja (20%).	PJ Data: Biro PKU (Bag Perencanaan), Inspektorat Sumber Data: Biro PKU (Bag Perencanaan), Inspektorat

		2	Opini BPK atas laporan keuangan BSN	Perhitungan: Opini atas Laporan Keuangan tahun n-1 yang dikeluarkan oleh BPK Definisi: Opini atas Laporan Keuangan n-1 yang dikeluarkan oleh BPK setetelah dilakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan sekali dalam setahun.	PJ Data: Biro PKU (Bag Keuangan), Inspektorat Sumber Data: Biro PKU (Bag Keuangan), Inspektorat
		3	Indeks kepuasan layanan internal Biro PKU	Perhitungan: Hasil survey layanan internal Biro PKU (skala 1-5) Definisi: Survei untuk mengukur kepuasan layanan Biro PKU yang ditujukan kepada Unit Kerja di lingkungan BSN	PJ Data: Biro PKU (Bag Perencanaan) Sumber Data: Biro PKU (Bag Perencanaan, Bag Keuangan, Bag Umum)
2	Terselenggaranya penyusunan anggaran dan pelaksanaan monev yang efektif dan akuntabel	4	Persentase penyelesaian dan penyampaian dokumen rencana kerja dan anggaran yang tepat waktu	Perhitungan: Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran yang disampaikan ke Kemenkeu tepat waktu ---------- x 100% Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran yang disusun Definisi: Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD dan K/L serta rencana pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.	PJ Data: Biro PKU (Bag Perencanaan) Sumber Data: Biro PKU (Bag Perencanaan)
		5	Persentase penyelesaian dan penyampaian laporan kinerja tepat waktu	Perhitungan: Jumlah Laporan Kinerja yang disampaikan kepada KemenPANRB tepat waktu ---------- x 100%	PJ Data: Biro PKU (Bag Perencanaan) Sumber Data:

				Jumlah Laporan Kinerja yang disusun (1 BSN, 5 Ess I, 16 Ess II) Definisi: Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.	Biro PKU (Bag Perencanaan)
		6	Persentase hasil monev yang ditindaklanjuti	Perhitungan: Jumlah hasil Monev Unit kerja (bulanan, triwulanan) yang ditindaklanjuti ---------- x 100% Jumlah hasil Monev Unit kerja (bulanan, triwulanan) yang harus ditindaklanjuti Definisi: Monitoring dan evaluasi (monev) adalah suatu proses pemantauan dan penilaian kemajuan serta keberhasilan suatu kegiatan.	PJ Data: Biro PKU (Bag Perencanaan) Sumber Data: Biro PKU (Bag Perencanaan)
3	Terkelolanya anggaran yang akurat dan akuntabel	7	Persentase kesesuaian penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tepat waktu	Perhitungan: Jumlah penyampaian Laporan Keuangan kepada Kemenkeu tepat waktu ---------- x 100% Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun Definisi: Laporan Keuangan K/L merupakan pertanggungjawaban keuangan K/L meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan yang ditandatangani oleh	PJ Data: Biro PKU (Bag Keuangan) Sumber Data: Biro PKU (Bag Keuangan)

				Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran dan dilampiri dengan Laporan Barang Penggunamenurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Laporan Rekening Pemerintah.	
		8	Persentase penyampaian laporan PNBP tepat waktu	Perhitungan: Jumlah penyampaian Laporan PNBP kepada Kemenkeu tepat waktu ---------- x 100% Jumlah dokumen laporan PNBP yang disusun Definisi: Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. PNBP dipungut atau ditagih oleh Instansi Pemerintah dengan perintah UU atau PP atau penunjukan dari Menteri Keuangan. PNBP yang telah dipungut atau ditagih tersebut kemudian disetorkan ke kas negara dan wajib dilaporkan secara tertulis kepada Menteri Keuangan dalam bentuk Laporan Realisasi PNBP Triwulan	PJ data: Biro PKU (Bag Keuangan) Sumber Data: Biro PKU (Bag Keuangan)
4	Terkelolanya pelayanan administrasi dan ketatausahaan yang sistematis	9	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas BSN	Perhitungan: Jumlah sarpras yang dapat tersedia ---------- x 100% Jumlah sarpras yang dibutuhkan berdasarkan analisa kebutuhan Definisi: Sarana dan prasarana (sarpras) kantor adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai penunjang utama terselenggaranya pelaksanaan tugas perkantoran.	PJ Data: Biro PKU (Bag Umum) Sumber Data: Biro PKU (Bag Umum)

V .2 BIRO SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, DAN HUKUM

1. Tugas : melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi sumber daya aparatur, pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana, koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum.

2. Fungsi :
   a. penyiapan pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia;
   b. penyiapan pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana; dan
   c. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum dan pendokumentasian hukum serta pemberian informasi hukum.

3. Indikator Kinerja Utama :

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Cara Perhitungan	PJ Data/Sumber Data
1	Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi yang profesional	1	Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi BSN	Perhitungan: Hasil Penilaian lembar kerja evaluasi Reformasi Birokrasi dari KemenPANRB Definisi: Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pengukuran penilaian Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh KemenPANRB menggunakan penilaian Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil.	PJ Data: Biro SDMOH (Bag Ortala), Inspektorat Sumber Data: Biro SDMOH (Bag Ortala), Inspektorat
		2	Persentase Penerapan Budaya Kerja BSN	Perhitungan: Jumlah nilai penerapan budaya kerja unit ---------- x 100% Jumlah unit kerja yang dinilai Definisi: Penilaian penerapan budaya kerja unit kerja di lingkungan BSN dengan kriteria/metode kontes antar unit kerja	PJ Data: Biro SDMOH (Bag SDM) Sumber Data: Biro SDMOH (Bag SDM), Seluruh Unit Kerja

		3	Indeks kepuasan layanan internal Biro SDMOH	Perhitungan: Hasil survey layanan internal Biro SDMOH (skala 1-5) Definisi: Survei untuk mengukur kepuasan layanan Biro SDMOH yang ditujukan kepada Unit Kerja di lingkungan BSN	PJ Data: Biro SDMOH (Bag Ortala) Sumber Data: Biro SDMOH (Bag SDM, Bag Ortala, Bag Hukum)
2	Meningkatkan kinerja pengelolaan Sumber Daya Manusia	4	Persentase pemenuhan ASN yang mengikuti program peningkatan kompetensi	Perhitungan: Jumlah ASN yg mengikuti program peningkatan kompetensi minimal 20 jam/thn ---------- x 100% Jumlah total ASN BSN Definisi: Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti program peningkatan kompetensi minimal 20 jam/thn.	PJ Data: Biro SDMOH (Bag SDM) Sumber Data: Biro SDMOH (Bag SDM)
		5	Jumlah dokumen standar kompetensi jabatan	Perhitungan: Jumlah dokumen standar kompetensi jabatan (kumulatif) Definisi: Dokumen standar kompetensi jabatan (manajerial, teknis dan sosiokultural) yang disusun	PJ Data: Biro SDMOH (Bag SDM) Sumber Data: Biro SDMOH (Bag SDM)
3	Meningkatkan kinerja pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana	6	Persentase ASN BSN yang diases berdasarkan standar kompetensi	Perhitungan: Jumlah ASN BSN yang dinilai berdasarkan standar kompetensi ---------- x 100% Jumlah total ASN BSN Definisi: Perhitungan jumlah ASN BSN yang dinilai berdasarkan standar kompetensi (kumulatif setiap 2 tahun)	PJ Data: Biro SDMOH (Bag Ortala) Sumber Data: Biro SDMOH (Bag Ortala)

		7	Persentase pemenuhan ASN BSN sesuai ABK	Perhitungan: Jumlah ASN BSN yang tersedia ----------x 100% Jumlah kebutuhan ASN sesuai ABK Definisi: Analisis Beban Kerja (ABK) adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu, atau dengan kata lain analisis beban kerja bertujuan untuk menentukan berapa jumlah personalia dan berapa jumlah tanggung jawab atau beban kerja yang tepat dilimpahkan kepada seorang petugas	PJ Data: Biro SDMOH (Bag Ortala) Sumber Data: Biro SDMOH (Bag Ortala)
		8	Persentase pelaksanaan sistem manajemen mutu	Perhitungan: Jumlah ketidaksesuaian pelaksanaan SMM yang ditindaklanjuti ---------- x 100% Jumlah keseluruhan ketidaksesuaian pelaksanaan SMM Definisi: Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang dimaksud dalam IK adalah pelaksanaan sistem manajemen terintegrasi yang terdiri dari SNI ISO 9001, SNI ISO 37001, dan SNI ISO/IEC 27001, serta Reformasi Birokrasi dan Sistem Manajemen berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku	PJ Data: Biro SDMOH (Bag Ortala) Sumber Data: Biro SDMOH (Bag Ortala)
4	Meningkatkan kinerja pengelolaan Hukum	9	Jumlah peraturan perundang – undangan	Perhitungan: Jumlah peraturan perundang – undangan yang ditetapkan (tahun n) Definisi: Peraturan perundang – undangan yang ditetapkan	PJ Data: Biro SDMOH (Bag Hukum) Sumber Data: Biro SDMOH (Bag Hukum)

		10	Jumlah Keputusan Kepala BSN	Perhitungan: Jumlah Keputusan Kepala BSN yang ditetapkan (thn n) Definisi: Produk hukum yang berupa Surat Keputusan Kepala BSN	PJ Data: Biro SDMOH (Bag Hukum) Sumber Data: Biro SDMOH (Bag Hukum)
		11	Jumlah penyuluhan hukum	Perhitungan: Jumlah penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan (tahun n) Definisi: Penyuluhan hukum adalah kegiatan diseminasi peraturan dan peningkatan pemahaman ilmu/praktek hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BSN	PJ Data: Biro SDMOH (Bag Hukum) Sumber Data: Biro SDMOH (Bag Hukum)

V .3 BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT, KERJA SAMA, DAN LAYANAN INFORMASI

1. Tugas : melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi hubungan masyarakat, kerja sama, dan dokumentasi BSN.
2. Fungsi :
   a. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan hubungan masyarakat, hubungan antar lembaga, publikasi dan dokumentasi BSN;
   b. penyiapan koordinasi dan pemberian dukungan informasi strategis kepada pimpinan;
   c. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan serta dukungan administrasi kerja sama dalam negeri dan luar negeri;
   d. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan layanan penerbitan nomor identifikasi;
   e. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan layanan informasi dan pengaduan masyarakat; dan
   f. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan perpustakaan dan layanan dokumen standar.

3. Indikator Kinerja Utama :

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Cara Perhitungan	PJ Data/Sumber Data
1	Meningkatnya kinerja kelembagaan yang profesional	1	Tingkat citra kelembagaan	Perhitungan: Jumlah berita positif pemberitaan ---------- x 100% Jumlah pemberitaan Definisi: Citra kelembagaan dihasilkan dari artikel pemberitaan BSN dan SNI yang bernilai positif	PJ Data: Biro HKLI (Bag Humas) Sumber Data: Biro HKLI (Bag Humas)
		2	Indeks kepuasan layanan informasi dan perpustakaan (eksternal)	Perhitungan: Hasil survei eksternal atas kepuasan layanan informasi dan perpustakaan Definisi: Layanan informasi dan perpustakaan adalah layanan mengenai permintaan informasi maupun dokumen SNI, standar internasional, standar lainnya serta layanan peminjaman koleksi perpustakaan (buku, majalah, terbitan lainnya).	PJ Data: Biro HKLI (Bag LI dan Perpustakaan) Sumber Data: Biro HKLI (Bag LI dan Perpustakaan)
		3	Indeks kepuasan layanan internal Biro HKLI	Perhitungan: Hasil survei layanan internal Biro HKLI Definisi: Survei untuk mengukur kepuasan layanan Biro HKLI yang ditujukan kepada Unit Kerja di lingkungan BSN	PJ data: Biro HKLI (Bag LI dan Perpustakaan) Sumber Data: Biro HKLI (Bag Humas, Bag Kerja Sama, Bag LI dan Perpustakaan)
2	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Hubungan Masyarakat	4	Jumlah Publikasi Kelembagaan	Perhitungan: Jumlah Publikasi Kelembagaan (tahun n) Definisi: Publikasi Kelembagaan adalah suatu proses	PJ data: Biro HKLI (Bag Humas) Sumber Data: Biro HKLI (Bag Humas)

				penyampaian pesan kelembagaan kepada publiknya yang lebih banyak disampaikan melalui media massa. Publikasi kelembagaan BSN terdiri dari artikel berita (media massa umum, website BSN, majalah SNI Valuasi) dan kalender BSN	
		5	Jumlah Pameran Standardisasi yang diikuti BSN	Perhitungan: Jumlah Pameran Standardisasi yang diikuti BSN (tahun n) Definisi: Pameran Standardisasi adalah suatu kegiatan yang mempertemukan/memamerkan produk/output lembaga kepada publiknya yang dilakukan secara tatap muka/ komunikasi 2 arah. Jumlah pameran yang diikuti terdiri dari pameran yang diselenggarakan oleh sebuah instansi dan pameran yang diselenggarakan oleh BSN (IQE)	PJ Data: Biro HKLI (Bag Humas) Sumber Data: Biro HKLI (Bag Humas)
3	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri	6	Persentase Kerjasama Kelembagaan yang ditindaklanjuti	Perhitungan: Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti pada tahun n ---------- x 100% Jumlah kerjasama sampai tahun n-1 Definisi: Kerjasama kelembagaan yang ditindaklanjuti atau diimplementasikan ke dalam program nyata pada kedua belah pihak penandatangan kerjasama	PJ Data: Biro HKLI (Bag Kerja sama) Sumber Data: Biro HKLI (Bag Kerja sama)
		7	Jumlah Kerjasama Kelembagaan	Perhitungan: Jumlah Kerjasama yang dalam proses dan ditandatangani (tahun n) Definisi: Kerjasama kelembagaan adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh minimal 2 (dua) subyek	PJ Data: Biro HKLI (Bag Kerja sama) Sumber Data: Biro HKLI (Bag Kerja sama)

				hukum/lembaga untuk mencapai tujuan bersama yang dibuat tertulis dalam bentuk dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama atau bentuk lain antara BSN dengan subyek hukum di tingkat nasional dan internasional. Di tingkat nasional kerjasama dilakukan dengan pemerintah pusat/daerah, asosiasi, serta perguruan tinggi. Di tingkat internasional dengan Organisasi Internasional di bidang Pengembangan Standar, NSB/SDO serta mitra kerjasama lainnya	
4	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Layanan Informasi dan Perpustakaan	8	Jumlah Pemanfaat Layanan Informasi	Perhitungan: Jumlah Pemanfaat Layanan Informasi (tahun n) Definisi: Pengguna Sistem Informasi SPK antara lain SNI Corner, Lite, pengunjung perpustakaan, penyebarluasan publikasi, pengunjung KLT, pameran	PJ Data: Biro HKLI (Bag LI dan Perpustakaan) Sumber Data: Biro HKLI (Bag LI dan Perpustakaan)
		9	Jumlah SNI yang terjual	Perhitungan: Jumlah SNI yang terjual (tahun n) Definisi: SNI yang terjual adalah dokumen SNI yang terjual	PJ Data: Biro HKLI (Bag LI dan Perpustakaan) Sumber Data: Biro HKLI (Bag LI dan Perpustakaan)
		10	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Perhitungan: Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti (thn n) ---------- x 100% Jumlah pengaduan yang masuk (thn n) Definisi: Pengaduan adalah keluhan pelanggan BSN tentang SPK yang disampaikan ke BSN dan membutuhkan adanya penyelesaian/tindak lanjut	PJ Data: Biro HKLI (Bag LI dan Perpustakaan) Sumber Data: Biro HKLI (Bag LI dan Perpustakaan)

VI. INSPEKTORAT

1. Tugas : melaksanakan pengawasan intern atas pelaksanaan tugas BSN.
2. Fungsi :
   a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
   b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
   c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan kepala;
   d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
   e. pelaksanaan administrasi inspektorat.
3. Indikator Kinerja Utama :

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Cara Perhitungan	PJ Data/Sumber Data
1	Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi yang profesional	1	Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi BSN	Perhitungan: Hasil Penilaian lembar kerja evaluasi AKIP dari KemenPANRB Definisi: Evaluasi AKIP dilakukan dan dinilai oleh KemenPANRB dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas atas outcome terhadap penggunaan anggaran. Penilaian dilakukan terhadap 5 komponen: Perencanaan Kinerja (35%), Pengukuran Kinerja (20%), Pelaporan Kinerja (15%), Evaluasi internal (10%), dan Capaian Kinerja (20%).	PJ Data: Biro SDMOH, Inspektorat Sumber Data: Biro SDMOH, Inspektorat
		2	Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN	Perhitungan: Opini atas Laporan Keuangan tahun n-1 yang dikeluarkan oleh BPK Definisi: Opini atas Laporan Keuangan n-1 yang dikeluarkan oleh BPK setetelah dilakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan sekali dalam setahun.	PJ Data: Biro PKU, Inspektorat Sumber Data: Biro PKU, Inspektorat

		3	Opini atas laporan keuangan BSN	Perhitungan: Hasil Penilaian lembar kerja evaluasi AKIP dari KemenPANRB Definisi: Evaluasi AKIP dilakukan dan dinilai oleh KemenPANRB dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas atas outcome terhadap penggunaan anggaran. Penilaian dilakukan terhadap 5 komponen: Perencanaan Kinerja (35%), Pengukuran Kinerja (20%), Pelaporan Kinerja (15%), Evaluasi internal (10%), dan Capaian Kinerja (20%).	PJ Data: Biro PKU, Inspektorat Sumber Data: Biro PKU, Inspektorat
		4	Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat	Perhitungan: Hasil survey layanan internal Inspektorat Definisi: Survei untuk mengukur kepuasan layanan Inspektorat yang ditujukan kepada Unit Kerja di lingkungan BSN	PJ Data: Inspektorat Sumber Data: Inspektorat
2	Terwujudnya *good governance* dan *clean government*	5	Zona Integritas WBK/WBBM	Perhitungan: Unit kerja yang memenuhi persyaratan ZI WBK/WBBM yang dinilai berdasarkan PermenPANRB No. 52/2014 Definisi: Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada K/L/D yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi. Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik	PJ Data: Inspektorat Sumber Data: Inspektorat

3	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian internal BSN	6	Nilai Maturitas SPIP	Perhitungan: Penilaian mandiri Maturitas SPIP berdasarkan peraturan BPKP Definisi: Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkatkematangan/kesempurnaanpenyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	PJ Data: Inspektorat Sumber Data: Inspektorat
4	Meningkatkan kualitas proses pengawasan dan pengendalian internal	7	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	Perhitungan: Jumlah temuan pemeriksaan yg selesai di tindak lanjuti ---------- x 100% Jumlah temuan pemeriksaan Definisi: Hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan adalah berupa daftar temuan BPK atas pemeriksaan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan peundang-undangan yang belaku.	PJ Data: Inspektorat Sumber Data: Inspektorat
		8	Persentase penyelesaian dokumen Rencana Tindak Pengendalian berdasarkan manajemen resiko	Perhitungan: Jumlah dokumen Rencana Tindak Pengendalian yang disampaikan unit kerja ---------- x 100% Jumlah unit kerja Definisi: Rencana Tindak Pengendalian berdasarkan manajemen resiko adalah uraian tentang upaya instansi untuk mencapai berbagai tujuan dan	PJ Data: Inspektorat Sumber Data: Inspektorat

				sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko, yang meliputi upaya penguatan lingkungan pengendalian dan penguatan struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi untuk mengendalikan risiko.	
		9	Persentase rekomendasi hasil pengendalian internal yang ditindaklanjuti	Perhitungan: Jumlah penyelesaian tindak lanjut audit internal ---------- x 100% Jumlah rekomendasi audit internal Definisi: Audit internal adalah kegiatan yang independen dan objektif dalam bentuk pemberian keyakinan (assurance activities) dan konsultansi (consulting activities) yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditee).	PJ Data: Inspektorat Sumber Data: Inspektorat
		10	Jumlah temuan yang berulang	Perhitungan: Jumlah temuan yang berulang (internal) Definisi: Temuan audit berulang adalah temuan dengan permasalahan yang sama, yang selalu berulang dari tahun ke tahun walaupun temuan sebelumnya telah ditindaklanjuti.	PJ Data: Inspektorat Sumber Data: Inspektorat

VII. PUSAT RISET DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Tugas : melaksanakan riset dan pengembangan sumber daya manusia di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
2. Fungsi :
   a. penyusunan program penelitian, pengembangan dan pengkajian, diseminasi hasil riset, dan pengembangan sumber daya manusia standardisasi dan penilaian kesesuaian;
   b. pelaksanaan program penelitian, pengembangan dan pengkajian, diseminasi hasil riset, dan

pengembangan sumber daya manusia standardisasi dan penilaian kesesuaian;

c. pembinaan kompetensi profesi di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian;
d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian, pengembangan dan pengkajian, diseminasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian, dan pengembangan sumber daya manusia standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

3. Indikator Kinerja Utama :

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Cara Perhitungan	PJ Data/Sumber Data
1	Meningkatnya kinerja pengelolaan pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap jasa pelatihan standardisasi	Perhitungan: Nilai survey kepuasan masyarakat terhadap layanan pelatihan standardisasi (skala 1-4 dan dikonversikan dengan nilai dasar 25) Definisi: Survey kepuasan masyarakat terhadap layanan jasa pelatihan standardisasi yang mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	PJ Data: Pusrisbang Sumber Data: Pusrisbang (Bid Pengemb SDM SPK)
2	Meningkatkan mutu hasil Litbang standardisasi sesuai kebutuhan pemangku kepentingan	2	Jumlah Rekomendasi kebijakan/keputusan hasil riset yang dimanfaatkan internal dan eksternal BSN	Perhitungan: Jumlah policy brief/paper/rekomendasi hasil riset yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan SPK baik internal BSN maupun stakeholder (kumulatif) Definisi: Rekomendasi kebijakan/keputusan hasil riset yaitu usulan kebijakan yang diperoleh dari proses kegiatan penelitian dan tertuang dalam bentuk naskah akademik maupun policy paper.	PJ Data: Pusrisbang Sumber Data: Pusrisbang (Bid Desiminasi hasil riset)

		3	Jumlah KTI dari hasil penelitian yang diterbitkan dalam publikasi nasional maupun internasional	Perhitungan: Jumlah Karya Tulis Ilmiah hasil penelitian BSN yang diterbitkan dalam publikasi nasional maupun internasional (kumulatif) Definisi: Karya Tulis Ilmiah (KTI) yaitu publikasi hasil penelitian BSN yang diterbitkan di jurnal ilmiah nasional, jurnal ilmiah internasional, prosiding ilmiah nasional dan prosiding ilmiah internasional.	PJ Data: Pusrisbang Sumber Data: Pusrisbang (Bid Desiminasi hasil riset)
		4	Jumlah Sitasi KTI yang di Publikasikan	Perhitungan: Jumlah Sitasi KTI yang di publikasikan (kumulatif dari tahun sebelumnya) Definisi: Sitasi (kutipan) KTI yaitu hasil publikasi KTI peneliti BSN yang dijadikan referensi pada KTI yang dipublikasikan oleh peneliti internal maupun eksternal BSN.	PJ Data: Pusrisbang Sumber Data: Pusrisbang (Bid Desiminasi hasil riset)
		5	Jumlah prototipe hasil penelitian	Perhitungan: Jumlah prototipe hasil penelitian (kumulatif dari tahun sebelumnya) Definisi: Prototipe adalah purwarupa hasil penelitian BSN	PJ Data: Pusrisbang Sumber Data: Pusrisbang (Bid Desiminasi hasil riset
		6	Jumlah HAKI yang berhasil didapatkan	Perhitungan: Jumlah HAKI yang berhasil didaftarkan dan/atau granted (kumulatif dari tahun sebelumnya) Definisi: HAKI adalah paten hasil penelitian BSN yang didaftarkan dan/atau granted	PJ Data: Pusrisbang Sumber Data: Pusrisbang (Bid Desiminasi hasil riset)

3	Meningkatkan publikasi di bidang standardisasi	7	Jurnal Publikasi yang ter-indeks internasional	Perhitungan: Peningkatan nilai self asessment dan indexsasi (kumulatif) Definisi: Publikasi yang terindeks internasional yaitu media publikasi ilmiah berbasis online jurnal yang proses penerbitannya memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan dan telah terindeks dalam database internasional seperti *web science, scopus*, DOAJ, sinta dsb.	PJ Data: Pusrisbang Sumber Data: Pusrisbang (Bid Desiminasi hasil riset)
4	Menumbuh kembangkan budaya standar melalui peningkatan kompetensi SDM di bidang SPK	8	Persentase peningkatan kompetensi SDM SPK melalui layanan pelatihan dengan predikat minimal "Baik".	Perhitungan: Jumlah SDM yang mengikuti layanan pelatihan SPK dengan predikat minimal "Baik" di tahun berjalan ---------- x 100% Jumlah total SDM yang mengikuti layanan pelatihan SPK di tahun berjalan (Nilai akhir pelatihan ≥ 70) Definisi: Predikat yang diperoleh oleh SDM SPK sebagai bukti peningkatan kompetensinya yang diperoleh melalui layanan pelatihan dengan nilai akhir pelatihan ≥ 70	PJ Data: Pusrisbang Sumber Data: Pusrisbang (Bid. Pengemb SDM SPK)
		9	Jumlah role model pendidikan tinggi dengan *learning outcome* berbasis SPK	Perhitungan: Perguruan tinggi yang menerapkan pendidikan standardisasi (kumulatif) Definisi: Perguruan tinggi yang telah menerapkan pendidikan standardisasi dengan kriteria mengajarkan pengetahuan SPK melalui mata	PJ Data: Pusrisbang Sumber Data: Pusrisbang (Bid. Pengemb SDM SPK)

				kuliah dengan muatan SPK baik mata kuliah yang berdiri sendiri ataupun dalam bentuk sisipan (mata kuliah pilihan maupun wajib)	
		10	Persentase SDM internal yang ditingkatkan kompetensinya di bidang SPK	Perhitungan: Jumlah ASN BSN yang ditingkatkan kompetensinya di bidang SPK ---------- x 100% Jumlah total ASN BSN (kumulatif) Definisi: Banyaknya ASN BSN yang telah diberikan peningkatan kompetensi dibidang SPK	PJ Data: Pusrisbang Sumber Data: Pusrisbang (Bid. Pengemb SDM SPK)
5	Meningkatkan kompetensi Peneliti SPK	11	Jumlah peneliti bidang SPK yang terindeks global	Perhitungan: Jumlah peneliti bidang SPK yang terindeks global (kumulatif dari tahun sebelumnya) Definisi: Peneliti bidang SPK yang terindeks global adalah peneliti bidang SPK BSN yang memiliki KTI terpublikasi di publikasi ilmiah terindeks global	PJ Data: Pusrisbang Sumber Data: Pusrisbang (Bid. Pengemb SDM SPK)

VIII. PUSAT DATADAN SISTEM INFORMASI

1. Tugas : melaksanakan pengelolaan sistem informasi dan tata kelola Datastandardisasi dan penilaian kesesuaian.
2. Fungsi :
   a. penyusunan rencana dan program pengembangan infrastruktur dan keamanan informasi, sistem informasi dan tata kelola Datadi bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian;
   b. pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta keamanan informasi; dan
   c. pengelolaan sistem informasi dan tata kelola Datadi bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
3. Indikator Kinerja Utama :

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Cara Perhitungan	PJ Data/Sumber Data
1	Meningkatnya Pengembangan Sistem Informasi	1	Tingkat Evaluasi Sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE)	Perhitungan: Skoring hasil evaluasi SPBE sesuai kriteria KemenPANRB (level 1-5)	PJ Data: Pusdatin Sumber Data:

	SPK			Definisi: Evaluasi Sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) adalah proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	Pusdatin
		2	Indeks kepuasan Internal dan masyarakat terhadap efektivitas Sistem Informasi SPK	Perhitungan: Nilai survey layanan internal dan eksternal Pusdatin skala 1-5 Definisi: Survei untuk mengukur kepuasan layanan internal dan eksternal Pusdatin dalam mengukur efektivitas sistem informasi SPK	PJ Data: Pusdatin Sumber Data: Pusdatin
2	Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur dan Keamanan Informasi	3	Tingkat downtime infrastruktur TI dan jaringan	Perhitungan: Jumlah akumulasi waktu downtime (dalan jam) infrastruktur dan jaringan ---------- x 100% Total jam dalam 1 tahun (8766) Definisi: *Downtime* infrastruktur TI dan jaringan yaitu periode waktu ketika komputer atau bagian vital dari sistem teknologi informasi (TI) tidak tersedia/mengalami kegagalan	PJ Data: Pusdatin Sumber Data: Pusdatin (Bid IKISPK)
		4	Tingkat Penyelesaian Grand Design TI	Perhitungan: Tingkat penyelesaian *Grand Design* TI hingga ditetapkan Kepala BSN Definisi: *Grand Design* TI BSN adalah rencana penggunaan Teknologi Informasi (TI) yang terintegrasi untuk	PJ Data: Pusdatin Sumber Data: Pusdatin (Bid IKISPK)

				mendukung kegiatan operasional organisasi	
3	Meningkatkan Pengembangan Sistem Informasi dan Tata Kelola Data	5	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi yang dipelihara dan dikembangkan sesuai grand design TI	Perhitungan: Jumlah Aplikasi Sistem Informasi yang dipelihara dan dikembangkan sesuai grand design TI (kumulatif) Definisi: Aplikasi Sistem Informasi adalah aplikasi komputer untuk mendukung operasi dari suatu organisasi.	PJ Data: Pusdatin Sumber Data: Pusdatin (Bid SITKD)
		6	Jumlah SNI yang diakses	Perhitungan: Jumlah SNI yang diakses (download dan akses) pada tahun n Definisi: SNI yang di akses adalah SNI yang didownload dan di akses dari website BSN atau aplikasi yang disediakan BSN	PJ Data: Pusdatin Sumber Data: Pusdatin (Bid SITKD)
		7	Jumlah pengunjung Sistem informasi SPK	Perhitungan: Jumlah pengunjung Sistem informasi SPK (tahun n) Definisi: Pengguna Sistem Informasi SPK antara lain SNI Corner, Lite, pengunjung perpustakaan, penyebarluasan publikasi, pengunjung KLT, pameran	PJ Data: Pusdatin Sumber Data: Pusdatin (Bid SITKD)

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA